

Izin Apotek Persorangan - Perubahan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Asli Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)	Wajib
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Wajib
3	Scan Asli KTP Apoteker dan/atau Surat Keterangan Domisili Jika Alamat Tidak Sesuai KTP	Wajib
4	Izin Apotek yang Lama (Asli)	Wajib
5	Surat yang Menyatakan Status Bangunan (Hak Milik/Sewa Minimal 3 Tahun)	Wajib
6	Scan Asli NPWP Apoteker	Wajib
7	Daftar Sarana, Prasarana dan Perlengkapan yang Ditandatangani oleh Apoteker (Memakai Kop Surat Apotek)	Wajib
8	Akta Perjanjian Kerja Sama Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) Minimal 3 Tahun	Wajib
9	Scan Peta Lokasi Apotek (Memakai Kop Surat)	Wajib
10	Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
11	Daftar Buku dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Farmasi yang Ditandatangani oleh Apoteker (Memakai Kop Surat Apotek)	Wajib
12	Scan Asli Sertifikat Kompetensi Apoteker	Wajib
13	Scan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan IMB	Wajib
14	Daftar SDM Kefarmasian (Minimal 3 Orang) Memakai Kop Surat	Wajib
15	Scan Denah Bangunan Apotek (Memakai Kop Surat)	Wajib
16	Surat Pernyataan Pemilik Sarana Tidak Terlibat Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat/Farmasi (di Atas Materai & Memakai Kop Surat)	Wajib
17	Pasfoto 4x6 dan 3x4 Apoteker	Wajib
18	Surat Izin Atasan/PSA (untuk Sarana dan Tempat Praktik ke-2) Memakai Kop Surat dan stempel	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Registrasi, Izin Praktik dan Kerja Tenaga Kefarmasian
2	Surat Edaran Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin, Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
3	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
5	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
6	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

8	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
9	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Keputusan Walikota Batam Nomotr : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pennyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00